

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Laporan Keuangan

2.1.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Akuntansi merupakan sistem informasi yang mempunyai maksud dan tujuan akhir memberikan keterangan mengenai data ekonomi untuk pengambilan keputusan bagi siapa saja yang berkepentingan. Dalam akuntansi, informasi itu disusun berdasarkan ikhtisar laporan keuangan.

Menurut Kasmir (2011:7), laporan keuangan adalah sebagai berikut: “laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Sedangkan pengertian laporan keuangan menurut Hanafi dan Halim (2012:49) adalah “salah satu sumber informasi yang penting disamping informasi lain seperti informasi industri, kondisi perekonomian, pangsa pasar perusahaan, kualitas manajemen dan lainnya.”

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2012) menjelaskan bahwa “Laporan keuangan yang menyediakan informasi menyangkut

posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan.”

Sedangkan menurut Baridwan (2010:17), Laporan keuangan merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh para pemilik perusahaan.

2.1.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Revisi 2009:3) adalah:

“Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi:

- (a) aset;
- (b) kewajiban;
- (c) ekuitas;
- (d) pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian; dan
- (e) arus kas.

Pelaporan keuangan itu bukanlah merupakan sebuah akhir, tetapi ia dimaksudkan untuk memberi informasi yang berguna dalam melakukan

pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi. Tujuan dari pelaporan keuangan bukanlah suatu hal yang abadi, mereka akan dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi, legal, politik, dan sosial di mana pelaporan keuangan terjadi. Tujuan juga dipengaruhi oleh karakteristik dan keterbatasan dari jenis informasi yang dapat diberikan oleh pelaporan keuangan (Belkaoui, 2006).

Sedangkan tujuan laporan keuangan menurut Kieso, Weygandt dan Warfield dengan alih bahasa Emil Salim (2007:5) adalah untuk memberikan:

- a. Informasi bagi pengambil keputusan
- b. Informasi untuk membantu pengambil keputusan dalam menilai jumlah penetapan waktu dan ketidakpastian penerimaan kas prospektif
- c. Informasi untuk menggambarkan sumber daya ekonomi perusahaan.

Lebih lanjut Kieso, Weygandt dan Warfield menjelaskan secara rinci sebagai berikut:

- a. Informasi bagi pengambil keputusan

Laporan keuangan harus berguna bagi investor serta kreditor saat ini atau potensial dan para pemakai lainnya untuk membuat keputusan investasi, kredit dan keputusan serupa secara rasional. Informasi yang disajikan harus komprehensif bagi mereka yang memiliki pemahaman yang memadai tentang aktivitas-aktivitas ekonomi dan bisnis serta ingin mempelajari informasi tersebut secara seksama.

- b. Informasi untuk membantu pengambil keputusan dalam menilai jumlah penetapan waktu dan ketidakpastian penerimaan kas prospektif.

Laporan keuangan harus membantu investor serta kreditor saat ini atau potensial dan para pemakai lainnya dalam menilai jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas prospektif dari dividen atau bunga dan hasil dari penjualan, penebusan atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman. Karena arus kas investor dan kreditor berhubungan dengan arus kas perusahaan, maka pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang dapat membantu investor, kreditor serta pemakai lainnya menilai jumlah, penetapan waktu dan ketidakpastian arus kas masuk bersih prospektif pada perusahaan terkait.

- c. Informasi untuk menggambarkan sumber daya ekonomi perusahaan.

Laporan keuangan harus menggambarkan dengan jelas mengenai sumber daya ekonomi dari sebuah perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber daya ke entitas lainnya dan entitas pemilik), dan pengaruh dari transaksi, kejadian serta situasi yang mengubah sumber daya perusahaan dan klaim pihak lain terhadap sumber daya tersebut.

Sedangkan menurut Fahmi (2011:28), tujuan utama dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak lain yang

berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan.

2.1.1.3 Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan dapat terdiri dari beberapa laporan yang menyangkut data-data keuangan suatu perusahaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan (2009:1,2) laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-komponen berikut:

- “1. neraca;
2. laporan laba rugi;
3. laporan perubahan ekuitas;
4. laporan arus kas; dan
5. catatan atas laporan keuangan”

Standar Akuntansi Keuangan (2009:1,7) menjelaskan rinci sebagai berikut:

1. Neraca

Menggambarkan posisi keuangan (harta, utang, dan modal) perusahaan dalam suatu tanggal tertentu.

Neraca perusahaan disajikan sedemikian rupa menonjolkan berbagai unsur posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca, minimal mencakup pos-pos berikut:

- a) aset berwujud;
- b) aset keuangan;
- c) aset keuangan;
- d) investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas;
- e) persediaan;
- f) piutang usaha dan piutang lainnya;
- g) kas dan setara kas;
- h) utang usaha dan utang lainnya;
- i) kewajiban yang diestimasi;
- j) kewajiban berbunga jangka panjang;
- k) hak minoritas;
- l) modal saham dan pos ekuitas lainnya.

2. Laporan Laba Rugi

Melaporkan seluruh hasil dan biaya untuk mendapatkan hasil dan laba (rugi) perusahaan selama suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi mencakup pos-pos berikut:

- a) pendapatan;
- b) laba rugi usaha;
- c) beban pinjaman;
- d) bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas;
- e) beban pajak;
- f) laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan;
- g) pos luar biasa;
- h) hak minoritas; dan
- i) laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

3. Laporan Perubahan ekuitas

Laporan ini menunjukkan:

- a) laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan;
- b) setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas;
- c) pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait.
- d) transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik
- e) saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode pada perusahaannya; dan
- f) rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

Secara umum laporan ini menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan

4. Laporan Arus Kas

Melaporkan jumlah kas yang dihasilkan dan digunakan oleh perusahaan melalui tiga tipe aktivitas, yaitu operasi, investasi dan pendanaan.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- a) informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;
- b) informasi yang diwajibkan dalam standar akuntansi tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas;
- c) informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Menurut Kasmir (2011:28), dalam praktiknya, secara umum ada lima macam jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu:

- “1. Neraca;
2. Laporan Laba Rugi;
3. Laporan Perubahan Modal;
4. Laporan Arus Kas;
5. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan”

2.1.1.4 Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas membuat informasi dalam laporan keuangan yang berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan bernilai ekonomis. Karakteristik kualitatif keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia melalui PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No 1 (2007:7) adalah:

- “a. Dapat dipahami
- b. Relevan
- c. Keandalan
- d. Dapat dibandingkan”

Adapun penjelasan mengenai karakteristik kualitatif laporan keuangan di atas adalah:

a. Dapat dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Dalam hal ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktifitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketentuan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan apabila informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu.

c. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan, atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Selain itu informasi harus diarahkan pada kebutuhan pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan atau keinginan pihak tertentu. Dalam hal menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, maka ketidakpastian tersebut diakui dengan mengungkapkan hakikat dan tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan yang sehat. Agar dapat diandalkan, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialistis dan biaya (kelengkapan). Kesenjangan untuk tidak mengungkapkan dapat mengakibatkan informasi menjadi tidak benar dan menyesatkan.

d. Dapat dibandingkan

Pemakai laporan keuangan harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, serta perusahaan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus

dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antara periode yang sama, dan untuk perusahaan yang berbeda.

2.1.2 Audit

2.1.2.1 Pengertian Auditing

Auditing menurut Soekirno Agoes (2012:4) adalah “*auditing* adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukann oleh orang yang berkompeten dan independen.”

Sedangkan pengertian *Auditing* menurut Arens, Elder, dan Beasley dengan alih Bahasa Amir Abadi Yusuf (2011:4) Audit adalah “Pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.”

2.1.2.2 Jenis-jenis Audit

Menurut Arens, Elder, dan Basley dengan alih Bahasa Amir Abadi Jusuf (2011:17-18) terdapat tiga jenis utama audit yang dilakukan oleh akuntan public, yaitu:

- “1. Audit Operasional (*Operational audit*)
2. Audit ketaatan (*Compliance audit*)
3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement audit*).”

Lebih lanjut lagi Arens et.al menjelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Audit Operasional (*Operational audit*)

Bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi dan efektifitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Pada akhir audit operasional, manajemen biasanya mengharapkan saran-saran untuk memperbaiki operasi. Dalam audit operasional, pelaksanaan *review* atau penelaah yang dilakukan tidak terbatas pada akuntansi, tetapi dapat mencakup evaluasi atas struktur organisasi, operasi komputer, metode produksi, pemasaran dan semua bidang lainnya dimana auditor menguasainya. Oleh karena banyaknya bidang yang efektifitas operasionalnya dapat dievaluasi, tidak mungkin menggambarkan karakteristik pelaksanaan audit operasional yang tipikal. Mengevaluasi secara objektif, efisien dan efektifitas operasi sudah memenuhi kinerja yang ditetapkan jauh lebih sulit daripada audit ketaatan dan audit laporan keuangan. Selain itu, penetapan kriteria untuk mengevaluasi informasi dalam audit operasional juga bersifat sangat subjektif. Dalam pengertian ini, audit operasional lebih menyerupai konsultasi manajemen daripada apa yang biasanya dianggap audit.

2. Audit ketaatan (*Compliance audit*)

Bertujuan untuk menentukan apakah pihak yang diaudit mengikuti prosedur, aturan atau ketentuan tertentu yang telah

ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Hasil dari audit ketaatan biasanya dilaporkan kepada manajemen, bukan kepada pengguna luar. Karena manajemen adalah kelompok pertama yang berkepentingan dengan tingkat ketaatan terhadap prosedur dan peraturan yang digariskan, oleh karena itu sebagian besar jenis pekerjaan ini sering dilakukan oleh auditor yang bekerja pada unit organisasi itu. Bila organisasi seperti Dirjen Pajak ingin menentukan apakah individu atau organisasi telah menaati persyaratan, auditor dipekerjakan oleh organisasi yang mengeluarkan persyaratan tersebut.

3. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement audit*)

Bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu. Biasanya, kriteria yang berlaku adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP), walaupun auditor mungkin saja melakukan audit atas laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan akuntansi dasar kas atau beberapa dasar lainnya yang cocok untuk organisasi tersebut. Oleh karena itu semakin kompleks, tidak lagi cukup bagi auditor untuk hanya berfokus pada transaksi-transaksi akuntansi. Auditor juga harus memahami entitas dan lingkungan secara mendalam. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang industri klien berikut peraturan dan operasinya, termasuk hubungan eksternal seperti dengan pemasok, pelanggan,

dan kreditor. Auditor juga mempertimbangkan strategi dan proses bisnis klien serta faktor-faktor keberhasilan yang sangat penting yang berhubungan dengan strategi tersebut.

Tabel 2.1 Contoh-contoh Tiga Jenis Audit

Jenis Audit	Contoh	Informasi	Kriteria yang Ditetapkan	Bukti-bukti yang tersedia
Audit Operasional	Mengevaluasi apakah pemrosesan gaji yang terkomputerisasi untuk anak perusahaan H telah beroperasi secara efisien dan efektif.	Jumlah catatan gaji yang diproses dalam satu bulan, biaya departemen, dan jumlah kesalahan yang terjadi.	Standar perusahaan untuk efisiensi dan efektifitas departemen penggajian.	Laporan kesalahan, catatan gaji, dan biaya pemrosesan gaji.
Audit Ketaatan	Menentukan apakah persyaratan bank untuk perpanjangan pinjaman telah dipenuhi.	Catatan perusahaan	Ketentuan perjanjian peminjaman.	Laporan keuangan dan perhitungan oleh auditor.
Audit Laporan Keuangan	Audit tahunan atas laporan keuangan BCA.	Laporan Keuangan BCA	Prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.	Dokumentasi, catatan dan sumber bukti dari luar.

Sumber: Arens, Elder, Beasley. (2011) dengan ahli Bahasa Amir Abadi Jusuf. *Jasa Audit dan Asuransi Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia)* Buku 1

2.1.2.3 Standar *Auditing*

Standar *auditing* merupakan ukuran pelaksanaan tindakan yang menjadi pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit (Mulyadi,2002). Menurut PSAP 01 (2011: 150.1-150.2) Standar *auditing* yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia terdiri atas sepuluh standar yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

a. Standar umum yaitu:

- 1) Audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor,
- 2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi, dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor,
- 3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat,

b. Standar pekerjaan lapangan yaitu:

- 1) Pekerjaan harus direncanakan sebaiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya,
- 2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang dilakukan,
- 3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit

c. Standar pelaporan yaitu:

- 1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,
- 2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya,
- 3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor,
- 4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.

Pemenuhan standar audit oleh auditor dapat berdampak lamanya penyelesaian laporan audit, tetapi juga berdampak pada peningkatan kualitas hasil auditnya. Pelaksanaan audit yang semakin sesuai dengan standar membutuhkan waktu semakin lama. Sebaliknya, semakin tidak sesuai dengan standar pekerjaan audit, semakin pendek waktu yang diperlukan. (Imam Subekti dan Novi Wulandari Widiyanti,2004)

2.1.3 *Audit Delay*

2.1.3.1 *Pengertian Audit Delay*

Menurut Lawrence dan Briyan (1988) dalam Ani Yulianti (2011: 12) *Audit Delay* adalah lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit. Maka semakin panjang *audit delay* semakin lama auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya.

Menurut Ashton, Willingham, dan Elliot (1987), Carslaw dan Kaplan (1991) dalam Rulick Setyahadi (2012), *Audit delay is the length of time from a company's fiscal year end to the date of the auditor's report.*

Menurut Widati dan Septy (2008: 175) menjelaskan bahwa *audit delay* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan audit. Dalam penelitian lain *Audit delay* disebut juga dengan istilah *audit reporting lead time* (Owusu Ansah, 2000), dan *audit report lag* (Knechel dan Payne, 2001).

Audit delay inilah yang dapat mempengaruhi ketepatan informasi yang dipublikasikan, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat ketidakpastian keputusan yang berdasarkan informasi yang dipublikasikan. Keterkaitan lamanya waktu yang dibutuhkan akuntan publik untuk menyelesaikan proses pengauditan hingga penyajian opininya atas laporan keuangan tahunan, merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi proses penyajian ke publik, dibawah ketentuan batas waktu yang telah ditentukan.

Perusahaan yang sudah *go public* harus menyerahkan laporan keuangan tahunannya disertai dengan opini akuntan kepada Bapepam. Peraturan Bapepam tersebut diatur dalam Undang-Undang No.8 tahun 1995 tentang publikasi laporan keuangan tahunan auditan yang bersifat wajib dengan batas waktu 120 hari dari akhir tahun fiskal sampai tanggal diserahkannya laporan keuangan yang telah diaudit ke BAPEPAM. Namun, Sejak 30 September 2003, peraturan ini diganti dengan peraturan baru dengan Nomor X.K.2 tentang kewajiban penyampaian laporan keuangan ke Bapepam menjadi 90 hari.

Dyer dan McHugh dalam Mumpuni (2011) menggunakan tiga kriteria keterlambatan untuk melihat ketepatan waktu dalam penelitiannya, yaitu:

1. *Preliminary lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa.
2. *Auditor's report lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal laporan audit ditandatangani.
3. *Total lag*: interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.

Kerangka konseptual yang ditetapkan oleh Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2009) mengungkapkan bahwa jika terdapat penundaan yang tidak

semestinya, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya (Shulthoni, 2012:59)

Pentingnya *Audit Delay* suatu laporan keuangan menuntut auditor agar menyelesaikan pekerjaan lapangannya secara tepat waktu. Disisi lain, pengauditan membutuhkan waktu yang cukup dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan serta membutuhkan suatu ketelitian dalam menemukan bukti-bukti audit.

2.1.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi *Audit Delay*

1. Profitabilitas

Tujuan akhir yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal, di samping hal-hal lainnya. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan sehingga mencapai profit yang diharapkan.

Profitabilitas yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset dan modal saham yang tertentu (Hanafi dan Halim 2009: 83). Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba sehingga semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya (Utari Hilmi dan Syaiful Ali, 2008).

Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang lebih tinggi membutuhkan waktu dalam pengauditan laporan keuangan lebih cepat dikarenakan keharusan untuk menyampaikan kabar baik secepatnya kepada publik (Sistya Rachmawati, 2008).

Besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rasio rentabilitas.

Menurut Kasmir (2011: 196) “Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. ... Intinya adalah penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. “

A. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2011:197-198) Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu:

- 1) untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu;
 - 2) untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
 - 3) untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
 - 4) untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
 - 5) untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
 - 6) dan tujuan lainnya.
- Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk :
- 1) mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;

- 2) mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
- 3) mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
- 4) mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
- 5) mengetahui produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
- 6) mengetahui manfaat lain.

B. Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Menurut Kasmir (2011:199), Jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan adalah”

“1. Profit margin (*profit margin on sales*)

2. *return on investment* (ROI)

3. *return on equity* (ROE)

4. laba per lembar saham”

Adapun penjelasan mengenai masing-masing jenis rasio profitabilitas yaitu:

1) *Profit Margin on Sales*

Profit Margin on Sales atau Rasio Profit Margin atau margin laba atas penjualan merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan.

Terdapat dua rumus untuk mencari *profit margin*, yaitu

a) Untuk Margin laba kotor dengan rumus:

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan bersih} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Sales}}$$

b) Untuk Margin Laba bersih dengan rumus:

$$\text{Net Profit margin} = \frac{\text{Earning after Interest and Tax (EAIT)}}{\text{Sales}}$$

2) Hasil Pengembalian Investasi (*Return on Investment/ROI*)

Hasil pengembalian investasi atau lebih dikenal dengan nama *Return on Investment (ROI)* atau *return on total assets (ROA)* merupakan rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. *Return on investment* juga merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan didalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan. ROI juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Semakin kecil (rendah) rasio ini, semakin kurang baik.

Rumus untuk mencari *Return on Investment* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total Assets}}$$

Adapun rumus ROA menurut Lukman Syamsuddin (2009: 63) :

$$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Net Profit After Tax}}{\text{Total Assets}}$$

3) Hasil Pengembalian Ekuitas (*Return on Equity/ROE*)

Hasil pengembalian ekuitas atau *return on equity* atau rentabilitas modal sendiri merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Rasio ini menunjukkan efisiensi penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik. Artinya posisi pemilik perusahaan semakin kuat.

Rumus untuk mencari *Return on Equity* (ROE) dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Equity}}$$

4) Laba per Lembar Saham Biasa (*Earning per Share of Common Stock*)

Rasio laba per lembar saham atau disebut juga rasio nilai buku merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Rasio yang rendah berarti manajemen belum berhasil untuk memuaskan pemegang saham, sebaliknya dengan rasio yang tinggi, kesejahteraan pemegang saham meningkat. Dengan pengertian lain, tingkat pengembalian yang tinggi.

Keuntungan bagi pemegang saham adalah jumlah keuntungan setelah dipotong pajak. Keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham biasa adalah jumlah keuntungan dikurangi pajak, dividen, dan dikurangi hak-hak lain untuk pemegang saham prioritas.

Rumus untuk mencari laba per lembar saham biasa adalah sebagai berikut:

$$\text{Laba per Lembar Saham} = \frac{\text{Laba saham biasa}}{\text{Saham biasa yang beredar}}$$

2. Solvabilitas

Menurut Ukago (2005) dalam Ni Putu Widyantari dan Made Gede Wirakusuma (2012), solvabilitas didefinisikan sebagai kemampuan suatu perusahaan untuk membayar semua hutang-hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Semakin tinggi *leverage* keuangan maka berarti perusahaan memiliki banyak hutang pada pihak luar sehingga resiko keuangan menjadi semakin tinggi karena mengalami kesulitan keuangan (Ade Putri Handayani dan Made Gede Wirakusuma, 2013).

Menurut Ugo (2005) dalam Andi Kartika (2009), kesulitan keuangan merupakan berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi perusahaan di mata masyarakat. Pihak manajemen cenderung menunda penyampaian laporan keuangan berisi berita buruk. Menurut Abdulah dalam Made Gede Wirakusuma (2010) meningkatnya jumlah hutang yang digunakan perusahaan akan memaksa perusahaan untuk menyediakan laporan keuangan tahunan auditan secara lebih cepat.

Menurut Kasmir (2011:151), penggunaan dana yang bersumber dari pinjaman harus dibatasi meskipun menggunakan kombinasi dari berbagai sumber

dana. Kombinasi dari penggunaan dana dikenal dengan nama rasio solvabilitas atau rasio *leverage*.

Dalam Kasmir (2011:151) menyatakan bahwa rasio solvabilitas atau *leverage ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Dalam arti luar dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi).

A. Tujuan dan Manfaat Rasio Solvabilitas

Menurut Kasmir (2011:153), beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas adalah:

- 1) untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor);
- 2) untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
- 3) untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
- 4) untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
- 5) untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
- 6) untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
- 7) untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki; dan
- 8) tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk :

- 1) untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
- 2) untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam mencapai kewajiban yang bersifat tetap;
- 3) untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;

- 4) untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
- 5) untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
- 6) untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
- 7) untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki; dan
- 8) manfaat lainnya.

B. Jenis-Jenis Rasio Solvabilitas

Menurut Kasmir (2011:155) dalam bukunya Analisis Laporan Keuangan, terdapat beberapa jenis rasio solvabilitas yang digunakan perusahaan antara lain:

- “1. *debt on asset ratio (debt ratio)*
2. *debt to equity ratio*
3. *long term debt to equity ratio*
4. *tangible assets debt coverage*
5. *current liabilities to net worth*
6. *time interest earned*
7. *fixed charge coverage*”

Adapun penjelasan mengenai masing-masing jenis rasio solvabilitas yaitu:

1) *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*

Debt Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk perbandingan antara total utang dengan total aktiva . Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.

Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi

utang-utangnya dengan aktiva yang dimiliki. Dengan kata lain, semakin tinggi nilai DAR ini mengindikasikan :

- Semakin besar jumlah aset yang dibiayai oleh hutang.
- Semakin kecil jumlah aset yang dibiayai oleh modal.
- Semakin tinggi resiko perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban jangka panjang.
- Semakin tinggi beban bunga hutang yang harus ditanggung perusahaan

Rumusan untuk mencari *debt ratio* dapat digunakan sebagai berikut:

$$\text{Debt to asset ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total assets}}$$

2) *Debt to Equity Ratio*

Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan.

Bagi kreditor, semakin besar rasio ini, akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin baik. Sebaliknya dengan rasio yang rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva.

Rumus untuk mencari *debt to equity* dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut:

$$\text{Debt to equity ratio} = \frac{\text{Total Utang (Debt)}}{\text{Ekuitas (Equity)}}$$

DER dengan angka dibawah 1.00, mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki hutang yang lebih kecil dari ekuitas yang dimilikinya. Tetapi sebagai investor juga harus jeli dalam melihat DER ini, sebab jika total hutangnya lebih besar dari pada ekuitas, maka kita harus lihat lebih lanjut apakah hutang lancar atau hutang jangka panjang yang lebih besar :

- Jika jumlah hutang lancar lebih besar dari pada hutang jangka panjang, hal ini masih bisa kita terima, karena besarnya hutang lancar sering disebabkan oleh hutang operasi yang bersifat jangka pendek.
- Jika hutang jangka panjang yang lebih besar, maka dikuatirkan perusahaan akan mengalami gangguan likuiditas dimasa yang akan datang. Selain itu laba perusahaan juga semakin tertekan akibat harus membiayai bunga pinjaman tersebut.
- Beberapa perusahaan yang memiliki DER lebih dari satu, hal ini sangat mengganggu pertumbuhan kinerja perusahaannya juga mengganggu pertumbuhan harga sahamnya. Karena itu sebagian besar para investor menghindari perusahaan yang memiliki angka DER lebih dari 2.

3) *Long Term Debt to Equity Ratio* (LTDtER)

LTDtER merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

Rumusan yang digunakan untuk mencari *long term debt to equity ratio* adalah dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri, yaitu:

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Long term debt}}{\text{Equity}}$$

4) *Times Interest Earned*

Menurut J. Fred Weston dalam Kasmir (2011:160) *Times Interest Earned* merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C. Van Horne juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti *coverage ratio*.

Secara umum, semakin tinggi rasio, semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar bunga pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditor.

Rumus untuk mencari *times interest earned* dapat digunakan dengan dua acara sebagai berikut:

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya bunga}}$$

atau

$$\text{Times Interest Earned} = \frac{\text{EBT} + \text{Biaya bunga}}{\text{Biaya bunga}}$$

5) *Fixed Charge Coverage* (FCC)

Fixed Charge Coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *Times Interest Earned Ratio*. Perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease contract*). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang.

Rumus FCC adalah:

$$\text{Fixed charge coverage} = \frac{\text{EBT} + \text{Biaya bunga} + \text{kewajiban sewa}}{\text{Biaya bunga} + \text{kewajiban sewa}}$$

3. Ukuran Perusahaan

A. Pengertian Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham dan Houston (2001) dalam Tri Diana Wahyu Indriani (2014), Ukuran Perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun.

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel yang umum digunakan untuk menjelaskan mengenai variasi pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan (Agus Purwanto, 2011).

Sedangkan, dalam penelitian Edi Suwito dan Herawaty Arleen (2005), mengatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain.

Sesuai dengan keputusan Ketua BAPEPAM No. IX.C.7 tentang pedoman mengenai bentuk dan isi pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum oleh perusahaan menengah dan kecil, menyatakan bahwa perusahaan besar adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang memiliki jumlah kekayaan (total aset) tidak lebih dari Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), bukan merupakan afiliasi atau dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan perusahaan menengah atau kecil, dan bukan merupakan reksa dana. Sedangkan penawaran umum oleh perusahaan menengah atau kecil adalah penawaran umum sehubungan dengan efek yang ditawarkan oleh perusahaan menengah atau kecil, dimana nilai keseluruhan efek yang ditawarkan tidak lebih dari Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah).

B. Kategori Ukuran Perusahaan

UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengategorikan ukuran perusahaan ke dalam 4 kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan

tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

UU No. 20 tahun 2008 tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan /atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri , yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Adapun kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2008, BAB IV pasal 6 dijelaskan dalam tabel 2.2

Tabel 2.2 Kategori Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kategori	
	Kekayaan bersih (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) (dalam rupiah)	Penjualan Tahunan (dalam rupiah)
Usaha Mikro	< 50 juta	< 300 juta
Usaha Kecil	50 juta – 500 juta	300 juta – 25 milyar
Usaha Menengah	500 juta – 10 milyar	2.5 milyar – 50 milyar

Sumber: UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Pada dasarnya menurut Macfoedz (1994) dalam Febrianty (2011:302) ukuran perusahaan hanya terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar (*large firm*), perusahaan menengah (*medium size*), dan perusahaan kecil (*small size*). Penentuan ukuran perusahaan ini didasarkan kepada total aset perusahaan. Kategori ukuran perusahaan yaitu:

- a. **Perusahaan Besar**
Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp. 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari 50 Milyar/tahun.
- b. **Perusahaan Menengah**
Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp. 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp. 1 Milyar dan kurang dari Rp. 50 Milyar.
- c. **Perusahaan Kecil**
Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan, dan memiliki hasil penjualan minimal Rp. 1 Milyar/tahun.

Keputusan Ketua Bapepam No. Kep. 11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar. Sementara perusahaan besar adalah badan hukum yang total aktiva di atas seratus milyar.

Menurut Dyer dan McHugh dalam Andi Kartika (2009), perusahaan besar lebih konsisten untuk tepat waktu dibandingkan perusahaan kecil dalam menginformasikan laporan keuangannya. Perusahaan besar diduga akan menyelesaikan proses auditnya lebih cepat dibandingkan perusahaan kecil. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu manajemen perusahaan yang berskala besar cenderung diberikan insentif untuk mengurangi *audit delay* dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan dari pemerintah. Pihak-pihak ini sangat berkepentingan terhadap informasi yang termuat dalam laporan keuangan (Andi Kartika, 2009). Owusu-Ansah dalam Utari Hilmi dan Syaiful Ali (2008), mengatakan bahwa perusahaan yang memiliki sumber daya (aset) yang besar memiliki lebih banyak sumber informasi, lebih banyak staf akuntansi dan sistem informasi yang lebih canggih, memiliki sistem pengendalian intern yang kuat, adanya pengawasan dari investor, regulator dan sorotan masyarakat, maka hal ini memungkinkan perusahaan untuk melaporkan laporan keuangan auditannya lebih cepat ke publik.

C. Komponen Ukuran Perusahaan

Menurut Keputusan Ketua BAPEPAM No. IX.C.7 komponen ukuran perusahaan yang biasa dipakai dalam menentukan tingkat perusahaan adalah:

1. Tenaga Kerja
Merupakan jumlah pegawai tetap dan kontraktor yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu.
2. Tingkat Penjualan
Merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu misalnya satu tahun.
3. Total Utang ditambah dengan Nilai Pasar Saham Biasa
Merupakan jumlah utang dan nilai pasar saham biasa perusahaan pada suatu atau satu tanggal tertentu.
4. Total Aset
Merupakan keseluruhan aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.

4. Reputasi KAP

Menurut John Dalton – *Managing Corporate Reputation* dalam Ispawati Asri (2012) adalah:

“Reputation is the sum values that stakeholders attribute to a company, based on their perception and interpretation of the image that the company communicates over time. (Reputasi adalah total penilaian dari atribut-atribut stakeholder pada perusahaan, berdasarkan pada persepsi-persepsi mereka dan interpretasi interpretasi pada image/citra perusahaan yang dikomunikasikan secara terus menerus).“

Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha dibidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik (Sistya Rachmawati,2008). Dalam menyampaikan suatu laporan atau informasi akan kinerja perusahaan kepada publik yang akurat dan terpercaya, perusahaan diminta untuk menggunakan jasa KAP. Untuk meningkatkan kredibilitas dari laporan atau informasi tersebut, perusahaan menggunakan jasa KAP yang mempunyai reputasi atau nama baik, biasanya ditunjukkan dengan KAP yang berafiliasi dengan KAP besar yang berlaku universal yang dikenal dengan *Big Four Worldwide Accounting Firm* atau *Big Four* (Utari Hilmi dan Syaiful

Ali,2008). Kategori KAP yang bermitra dengan KAP *Big Four* di Indonesia yaitu (Wikipedia)

1. KAP Purwantono, Suherman & Surja afiliasi dengan KAP Ernst & Young (E&Y)
2. KAP Osman Bing Satrio & Eny afiliasi dengan KAP *Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte)*.
3. KAP Siddharta & Widjaja afiliasi dengan KAP *Klunveld Peat Marwick (KPMG)*.
4. KAP Tanudiredja, Wibisana & rekan afiliasi dengan KAP *Price Waterhouse Coopers (PWC)*.

Menurut Arens, Elder & Beasley (2008:32) ada empat kategori ukuran yang digunakan untuk menggambarkan kantor akuntan publik (KAP) antara lain:

1. **Kantor Internasional Empat besar.** Keempat KAP terbesar di Amerika Serikat disebut kantor akuntan publik internasional “*Big Four*”. Keempat kantor ini memiliki cabang di seluruh Amerika Serikat dan seluruh dunia. Kantor “*Big Four*” mengaudit hamper semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat maupun dunia serta banyak juga perusahaan yang lebih kecil juga.
2. **Kantor Nasional.** Tiga KAP di Amerika Serikat disebut kantor nasional, karena memiliki cabang di sebagian kota besar kota utama. Kantor nasional memberikan jasa yang sama seperti kantor “*Big Four*” dan bersaing secara langsung dengannya untuk mendapat klien. Setiap kantor nasional berafiliasi dengan kantor-kantor di Negara lain dan karenanya mempunyai kemampuan bertaraf internasional.
3. **Kantor regional dan kantor lokal yang besar.** Terdapat kurang dari 200 KAP yang memiliki staff professional lebih dari 50 orang. Sebagian hanya memiliki satu kantor dan terutama melayani klien-klien dalam jangka yang tidak begitu jauh. KAP yang lainnya memiliki beberapa cabang di satu Negara bagian atau wilayah dan melayani klien dalam radius yang lebih jauh.
4. **Kantor lokal kecil.** Lebih dari 95 persen dari semua KAP mempunyai kurang dari 25 KAP tenaga professional pada kantor yang hanya

memiliki satu cabang, dan entitas nirlaba, meskipun beberapa memiliki satu atau dua klien dengan kepemilikan publik. Banyak kantor lokal kecil tidak melakukan audit dan terutama memberikan jasa akuntansi serta perpajakan bagi klien-kliennya.

Menurut Supriyati dan Rolinda (2007:114) Kantor Akuntan Publik Internasional atau yang dikenal dengan *The Big Four* dianggap dapat melaksanakan auditnya secara efisien dan memiliki jadwal waktu yang lebih tinggi untuk menyelesaikan audit tepat waktu. KAP yang besar memperoleh insentif yang tinggi untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya lebih cepat dibandingkan dengan KAP lainnya. Selain itu, KAP besar akan berusaha mempertahankan reputasinya dengan memberikan opini yang sesuai, meskipun hal tersebut memiliki resiko yang cukup besar. Beberapa alasan perusahaan menggunakan jasa KAP *Big Four*, antara lain (Tuanakotta,2007):

1. Para pemegang saham menginginkan *Big Four Firm*;
2. Perusahaan ingin mendapatkan kepercayaan dari para investor atau dukungan dari pasar modal;
3. *The Big Four firm* mempunyai sumber daya keuangan yang kuat untuk mempertahankan pekerjaan mereka;
4. Perusahaan publik memang dituntut untuk menggunakan *The Big Four firm* dan kualitas jasa perusahaan *The Big Four firm*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *Audit Delay*, sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti dengan beragam variabel yang mempengaruhi dan beragam hasil

penelitian yang didapat. Penelitian terdahulu telah disebutkan sebelumnya pada BAB 1, namun dalam bagian ini penulis akan menyajikan penelitian terdahulu dalam tabel. Berikut tabel yang menyajikan peneliti terdahulu beserta hasil penelitiannya mengenai *Audit Delay*:

Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu

No	Variabel	Peneliti & Tahun											
		Prince Kennedy Modugu, Emmanuel Eragbhe, Ohiorenuan Jude Ikhatua (2012)		Sistya Rachmawati (2008)		Dewi Lestari (2010)		Diazzara Putri Yanuarizqi (2013)		Tri Diana Wahyu Indriani (2014)		Windu Andika (2015)	
		√/-	P/TP	√/-	P/TP	√/-	P/TP	√/-	P/TP	√/-	P/TP	√/-	P/TP
1.	Ukuran Perusahaan (log Total Aset)	√	P	√	P	√	TP	√	TP	√	P	√	P
2.	Solvabilitas (DAR)	√	TP	√	TP	√	P	-	-	√	P	√	TP
3.	Profitabilitas (ROA)	√	TP	√	TP	√	P	√	TP	√	P	√	TP
4.	Cabang Perusahaan Multinasional	√	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Ukuran KAP (<i>Big Four</i>)	√	TP	√	P	√	P	-	-	√	P	-	-
6.	Biaya Audit	√	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Tipe Industri	√	TP	-	-	-	-	√	TP	√	P	-	-

No	Variabel	Peneliti & Tahun											
		Prince Kennedy Modugu, Emmanuel Eragbhe, Ohiorenuan Jude Ikhatua (2012)		Sistya Rachmawati (2008)		Dewi Lestari (2010)		Diazzara Putri Yanuarizqi (2013)		Tri Diana Wahyu Indriani (2014)		Windu Andika (2015)	
		√/-	P/TP	√/-	P/TP	√/-	P/TP	√/-	P/TP	√/-	P/TP	√/-	P/TP
8.	Internal Audit	-	-	√	TP	-	-	√	TP	-	-	-	-
9.	Opini Audit	-	-	-	-	√	TP	-	-	-	-	√	P
10.	Likuiditas (Current Ratio)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√	TP

Keterangan:

√ = diteliti

- = tidak diteliti

P = memiliki pengaruh terhadap *Audit Delay*

TP = tidak memiliki pengaruh terhadap *Audit Delay*

2.3 Kerangka Pemikiran

Agency Theory atau teori agensi menjelaskan hubungan antara agen (pihak manajemen suatu perusahaan) dengan *principal* (pemilik). Agent memiliki informasi yang lebih banyak (*full information*) dibandingkan dengan *principal* disisi lain, sehingga menimbulkan adanya *asimetry information*. *Asimetry information* inilah yang menimbulkan masalah antara *agent* dan *principal*.

Upaya untuk menekan masalah agensi ini diperlukan adanya pihak independen untuk menjembatani konflik antara *principal* dan *agent*. Pihak independen ini adalah Kantor Akuntan Publik (KAP) atau auditor independen.

Proses pengauditan diharapkan dapat mengurangi ketidaksesuaian informasi yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham dengan menggunakan pihak lain yaitu auditor untuk mengesahkan laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang berperan penting dalam pengambilan keputusan dan berfungsi sebagai media komunikasi yang menyampaikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomis mengenai kinerja keuangan, perubahan posisi keuangan, pergerakan arus kas, serta sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Informasi dari laporan keuangan tersebut diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Oleh karena itu, laporan keuangan akan lebih bermanfaat apabila disajikan secara akurat dan tepat waktu.

Salah satu kendala perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat dan kepada Bapepam adalah ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan laporan auditnya. Auditor membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencari hal-hal pembuktian atas laporan keuangan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan sehingga menjadi peningkatan *audit delay*.

Menurut Lawrence dan Briyan (1988) dalam Ani Yulianti (2011: 12) lamanya hari yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan pekerjaan auditnya, yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diterbitkannya laporan keuangan audit disebut *Audit Delay*. Semakin lama proses pengauditan perusahaan yang dilakukan oleh auditor independen, semakin lama *audit delay* tersebut. Lamanya waktu penyelesaian audit dapat mempengaruhi ketepatan waktu dan kerelevanan sebuah informasi yang dipublikasi sehingga dapat

mempengaruhi ketidakpastian keputusan serta semakin berkurang manfaat yang didasarkan pada informasi yang dipublikasikan. Selain itu, ketepatan laporan keuangan juga berhubungan dengan informasi yang digunakan pasar untuk menentukan harga saham suatu perusahaan (Asthon et al., 1987).

Beberapa faktor yang diduga dapat berpengaruh terhadap *audit delay* dalam penelitian ini adalah Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Reputasi KAP.

2.3.1 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Audit Delay*

Profitabilitas dalam penelitian ini diproksikan melalui *return on asset* (ROA). Tingkat profitabilitas diperkirakan mempengaruhi *audit delay*, keterlambatan pengumuman laba tahunan dipengaruhi oleh isi laporan keuangan. Menurut Wirakusuma (2004) dalam Lianto dan Kusuma (2010), perusahaan yang mengalami kerugian mungkin akan meminta auditor untuk mengatur waktu auditnya lebih lama dibandingkan biasanya. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami keuntungan yang tinggi maka perusahaan berharap laporan keuangan auditan dapat diselesaikan secepatnya sehingga berita baik tersebut segera dapat disampaikan kepada investor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Sama seperti yang dikemukakan oleh Andi Kartika (2009), perusahaan tidak akan menunda penyampaian informasi yang berisi berita baik. Oleh karena itu, perusahaan yang mampu menghasilkan profit akan cenderung mengalami *audit delay* yang lebih pendek, sehingga kabar baik tersebut dapat segera disampaikan kepada para investor dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Hasil penelitian dari Sistya Rachmawati (2008), Andi Kartika (2009), Ade Putri Handayani dan Made Gede Wirakusuma (2010), Diazzara Putri Yanuarizqi (2013), Windu Andika (2015) mendapatkan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Sementara penelitian Dewi Lestari (2010) serta Tri Diana Wahyu Indriani (2015) mendapatkan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil penelitian Curtis (1976) dalam Imam Subekti dan Novi Wulandari Widiyanti (2008), menunjukkan bahwa variabel yang paling signifikan pengaruhnya terhadap adalah tingkat profitabilitas perusahaan. Jika perusahaan menghasilkan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi maka *audit delay* akan lebih pendek dibandingkan perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih rendah.

2.3.2 Pengaruh Solvabilitas terhadap Audit Delay

Solvabilitas merupakan rasio yang menggambarkan seberapa besar ketergantungan perusahaan terhadap kewajiban untuk membiayai aset dan operasional perusahaan (Karina Mutiara Dewi dan Sugeng Pamudji, 2013). Menurut Hanafi dan Halim (1996) dalam I Md Ngr Sudewa Mantik dan Edy Sujana (2012), perusahaan yang tidak *solvable* adalah perusahaan yang utang totalnya tidak lebih besar dibandingkan total asetnya. Tingkat solvabilitas yang tinggi akan membuat auditor berhati-hati dalam melakukan auditnya, karena hal ini dapat memicu resiko kerugian perusahaan tersebut sehingga menyebabkan *audit delay* lebih lama.

Rasio Solvabilitas yang digunakan adalah *Debt to Asset Ratio*. *Debt to Asset Ratio* (DAR) ini dapat menunjukkan kondisi kesehatan suatu perusahaan. Semakin tinggi DAR menunjukkan kondisi perusahaan yang kurang baik. Karena sebagian besar aset yang dimiliki digunakan untuk membiayai hutangnya. Apabila *debt to assets ratio* perusahaan tinggi, maka auditor harus melakukan pengumpulan alat bukti yang lebih kompeten untuk meyakinkan kewajaran laporan keuangannya. Oleh karena itu, auditor membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan audit terhadap hutang. (Jurinda Lucyanda dan Sabrina Paramitha Nura'ni,2012)

Hasil penelitian Dewi Lestari (2010), I Md Ngr Sudewa Mantik dan Edy Sujana (2013) serta Tri Diana Wahyu Indriani (2014), menunjukkan bahwa solvabilitas berpengaruh terhadap *audit delay*. Analisis solvabilitas difokuskan terutama pada reaksi dalam neraca yang menunjukkan kemampuan untuk melunasi utang lancar dan utang tidak lancar. Sedangkan penelitian Sistya Rachmawati (2008), Diazzara Putri Yanuarizqi (2013) dan Windu Andika (2015) menyatakan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.3.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Audit Delay*

Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dari total aset yang dimiliki perusahaan. Menurut Diazzara Putri Yanuarizqi (2013), manajemen perusahaan besar cenderung memiliki dorongan untuk mengurangi penundaan audit (*audit delay*) disebabkan oleh karena perusahaan besar senantiasa diawasi secara ketat oleh investor, asosiasi perdagangan dan agen regulator. Disamping

itu, ukuran perusahaan memiliki alokasi dana yang lebih besar untuk membayar biaya audit. Hal ini menyebabkan perusahaan yang memiliki ukuran yang besar cenderung memiliki *audit delay* yang lebih pendek bila dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki ukuran perusahaan yang lebih kecil.

Penelitian oleh Dyer dan McHugh (1975) dalam Made Gede Wirakusuma (2004) menyatakan bahwa manajemen perusahaan besar memiliki dorongan untuk mengurangi *audit delay* dan penundaan penyampaian laporan, yang disebabkan karena perusahaan tersebut dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan dan pemerintah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sisty Rachmawati (2008), Tri Diana Wahyu Indriani (2014), dan Windu Andika (2015) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *audit delay*.

Sedangkan beberapa penelitian yang dilakukan oleh Dewi Lestari (2010), I Md Ngr Sudewa Mantik dan Edy Sujana (2013), Diazzara Putri Yanuarizqi (2013) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

2.3.4 Pengaruh Reputasi KAP terhadap *Audit Delay*

Kualitas auditan berpengaruh terhadap kredibilitas laporan keuangan. Oleh karena itu, *underwriter* yang memiliki reputasi tinggi menginginkan emiten yang dijaminnya memakai jasa akuntan publik yang bereputasi tinggi pula.

Hasil penelitian dari Carmelia Putri Purnamasari (2012), menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan fasa auditor yang berafiliasi dengan *big four* akan melakukan proses audit yang lebih cepat dibandingkan perusahaan yang tidak menggunakan jasa auditor yang berafiliasi dengan *big four*. Hal ini diasumsikan karena KAP besar memiliki karyawan dalam jumlah yang besar, dapat mengaudit lebih efektif dan efisien,, memiliki jadwal yang fleksibel sehingga memungkinkannya untuk menyelesaikan auditannya lebih cepat, guna menjaga reputasinya.

Hasil penelitian dari Sistya Rachmawati (2008), Dewi Lestari (2010), I Md Ngr Sudewa Mantik dan Edy Sujana (2013) , serta Tri Diana Wahyu Indriani (2014) menunjukkan bahwa Reputasi auditor berpengaruh terhadap *audit delay*.

Sedangkan penelitian Andi Kartika (2009) dan Prince Kennedy Modugu, Emmanuel Eragbhe, Ohiorenuan Jude Ikhatua (2012) menunjukkan bahwa Reputasi KAP tidak memiliki pengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini mungkin dapat terjadi dikarenakan semakin ketatnya persaingan dalam lingkungan bisnis KAP dewasa ini, maka KAP non *Big Four* juga berusaha untuk mengaudit laporan keuangan klien dengan efektif dan efisien seperti yang dilakukan oleh KAP *Big Four*.

2.3.5 Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Reputasi KAP secara bersama-sama terhadap *Audit Delay*

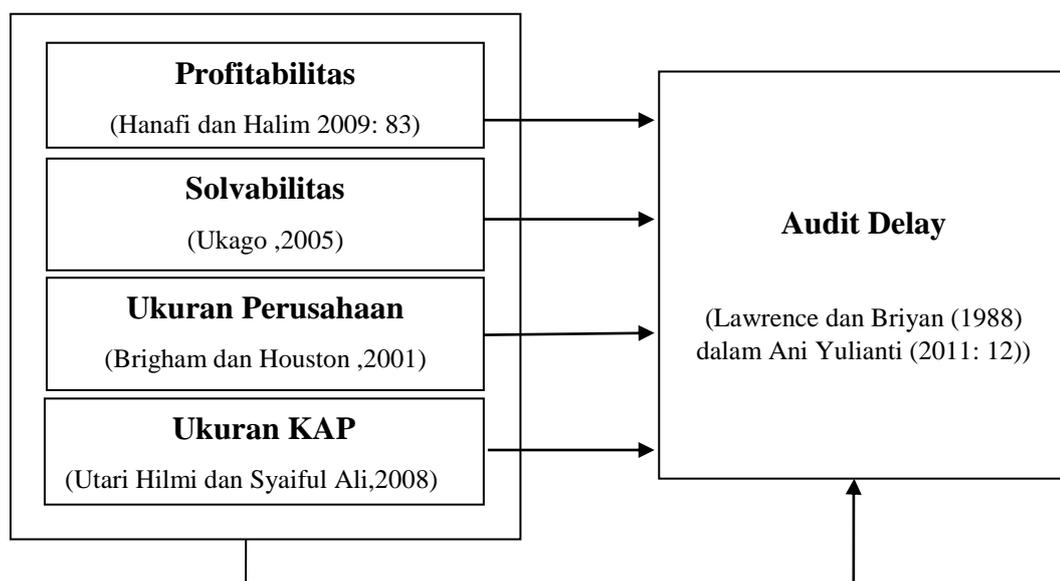
Dari penelitian terdahulu telah dilakukan pengujian secara simultan atau pengujian variabel secara bersama-sama terhadap *Audit Delay*. Adapun hasil

penelitian tersebut yaitu dalam penelitian Sistya Rachmawati (2008) mendapatkan hasil bahwa $F_{hitung} > F_{Tabel}$, yang berarti bahwa seluruh variabel yang diteliti yaitu profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, internal audit, dan ukuran KAP secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Audit Delay*.

Dewi Lestari (2010) yang menggunakan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, solvabilitas, kualitas auditor, dan opini auditor juga memperlihatkan bahwa keseluruhan variabel secara serempak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Begitu juga hasil penelitian yang dilakukan oleh I Md Ngr Sudewa Mantik dan Edy Sujana (2013) menunjukkan bahwa variabel Ukuran Perusahaan, Solvabilitas dan Reputasi Auditor secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Audit Delay*.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan dengan model kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1 Gambar Kerangka Pemikiran



2.4. Hipotesis Penelitian

Menurut Sugiyono (2012:93), pengertian Hipotesis adalah:

“merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pernyataan, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”

Berdasarkan Kerangka Pemikiran tersebut, maka dibuat hipotesis sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh profitabilitas terhadap *audit delay*
2. Terdapat pengaruh solvabilitas terhadap *audit delay*
3. Terdapat pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*
4. Terdapat pengaruh reputasi KAP terhadap *audit delay*
5. Terdapat pengaruh profitabilitas, solvabilitas, ukuran perusahaan, dan reputasi KAP secara bersama-sama terhadap *audit delay*